

5 Ruas Tak Penuhi Standar Pelayanan

JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol menyebutkan dari hasil evaluasi selama semester pertama 2013, lima jalan tol tidak memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).

Dimas Novita S.
dimas.novita@bisnis.co.id

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali mengatakan kelima jalan tol itu ialah Cawang-Tomang-Pluit, Jakarta-Cikampek, Sedyatmo, Jembatan Suramadu, dan Kanci-Pejagan.

"Pada survei tahap awal kami, lima ruas ini sudah menunjukkan tanda-tanda tidak memenuhi SPM. Belum resmi, tapi akan kami finalisasi untuk diumumkan pada September," katanya, Jumat (31/8).

Dia menjelaskan SPM yang tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha jalan tol (BUJT) tersebut pada umumnya merupakan kekurangan infrastruktur dan fasilitas jalan.

Dia mencontohkan untuk ruas Jakarta-Cikampek terdapat banyak lubang di badan jalan. Kemudian di Cawang-Tomang-Pluit, lampu penerangan jalan umum umumnya tidak berfungsi, begitu juga dengan jalan tol Sedyatmo (Bandara Soekarno-Hatta).

Sementara itu, kata Gani, pemegang konsesi Kanci-Pejagan masih meminta waktu untuk perbaikan dalam rangka memenuhi SPM dari awal tahun lalu. Khusus untuk Jembatan Suramadu, tidak terpenuhinya SPM bukan karena operator jalan tol tersebut, tetapi tanggung jawab dari pemerintah.

Guna dapat memenuhi SPM tersebut, BPJT akan memberikan waktu selama 3 bulan bagi BUJT untuk memenuhi SPM sehingga perusahaan jalan tol terhindar dari cedera janji. SPM merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi BUJT dalam penyesuaian tarif tol yang terjadi selama 2 tahun sekali.

- ▶ Kekurangan umumnya dalam hal infrastruktur dan fasilitas jalan.
- ▶ Pemegang konsesi diberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki jalan tol.
- ▶ Dua persoalan perlu dipecahkan untuk mempercepat investasi di jalan tol.

Pemegang Konsesi Jalan Tol yang Dinilai Tak Penuhi SPM

Tol	Pemegang konsesi	Panjang (Km)
● Jakarta-Cikampek	PT Jasa Marga Tbk	[REDACTED]
● Kanci-Pejagan	MNC Infrastruktur	[REDACTED]
● Cawang-Tomang-Pluit	PT Jasa Marga Tbk	[REDACTED]
● Sedyatmo	PT Jasa Marga Tbk	[REDACTED]
● Jembatan Suramadu	Pemerintah	5,5

Sumber: BPJT, diolah

BISNIS/TUTUN PURNAMA

Pluit dijadwalkan mendapatkan penyesuaian tarif pada bulan ini.

Untuk itu, BUJT dalam kota tersebut diimbau untuk segera melakukan perbaikan, sehingga bisa memperoleh kenaikan tarif pada tahun ini. "[Iu pun] bergantung dari seberapa besar upaya mereka. Kalau sudah selesai, ya bisa naik."

Sementara itu, kata Gani, untuk jalan tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 km yang tarifnya belum pernah sejak beroperasi pada awal 2010, pihaknya masih mengkaji kemungkinan tersebut.

"Untuk lubang sudah diperbaiki, tapi memang masalah kerataan belum dapat diselesaikan," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk Hasanudin mengatakan secara umum jalan tol milik perusahaan sudah memenuhi SPM.

Kendati demikian, memang ada beberapa lokasi yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

"Memang ada lubang-lubang di jalan tol Jakarta-Cikampek, dan juga lampu yang padam di jalan tol dalam kota dan Sedyatmo," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Minggu (1/9).

Dia menyampaikan saat ini sebanyak 40 lampu di tol dalam kota yang tidak berfungsi akibat baterai dan kabel pengisi daya dirusak serta dicuri.

Guna menanggulangi kerusakan tersebut, perusahaan sudah melakukan penambalan di lubang-lubang yang ada dan memasang kembali baterai baru. "Paling lambat, dalam 5 hari ke depan sudah selesai semua."

Hasan menuturkan terkait dengan maraknya pencurian baterai lampu, perusahaan telah meminta bantuan kepada pihak kepolisian setempat untuk memproses secara hukum para pelakunya.

Adapun untuk ruas lainnya yang telah lulus SPM, Jasa Marga tetap akan berkomitmen mempertahankan kinerja sehingga sesuai dengan standar pelayanan.

2 PERSOALAN

Pemerintah perlu memecahkan dua persoalan utama untuk mempercepat investasi di jalan tol.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menuturkan kedua masalah tersebut berkaitan dengan kesediaan perbankan mencairkan pinjamannya sebelum lahan terbebas 90% dan mendorong Badan Investasi Pemerintah memberikan dana talangan untuk pembebasan tanah.

"[Untuk persoalan yang pertama], perlu adanya jaminan dari pemerintah kepada perbankan, agar investor segera melaksanakan proyek dengan dukungan dana perbankan, tanpa harus menunggu lahan bebas semuanya," ujarnya, Jumat (30/8).

Menurutnya, saat ini masih banyak progres pembebasan lahan di sebagian besar proyek jalan berkisar antara 5-10%.

hingga 10%, sehingga, konstruksi tidak bisa langsung dikerjakan, karena harus menunggu dana perbankan cair.

Danang menuturkan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek jalan tol cepat terbangun sudah jelas, namun diperlukan pula kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Untuk itu, peran serta BIP untuk memberi-

kan dana talangan dalam pembebasan tanah diperlukan. "Bisa memanfaatkan dana talangan BIP, baru di-refinancing [oleh pemerintah] apabila pembebasan tanah telah mencapai 90%."

(Zulfriat)

